

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Tesis ini memulai analisis dari pertanyaan pertama yaitu “Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dalam meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2016”? Dalam tesis ini, pertanyaan pertama ini akan dianalisis dengan mencari bagaimana kecenderungan indikator-indikator *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BPD DIY diimplementasikan pada 3 tahun terakhir yaitu 2014, 2015 dan 2016.

*Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank BPD DIY dapat dipahami sebagai Tata Kelola Perusahaan, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tata kelola yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. GCG lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun selalu juga upaya menjadikan GCG sebagai budaya. Dengan memahami dan menjalankan budaya GCG, Bank BPD DIY akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing dalam bisnis dan pencapaian visinya.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku

umum pada industri perbankan. Dalam rangka hal tersebut, PT. Bank BPD DIY menerapkan pelaksanaan GCG berdasarkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Implementasi
3. Evaluasi

**Gambar 5.1**  
**Tahapan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)**

Persiapan	Implementasi	Evaluasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan <i>Good Corporate Governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan internalisasi <i>Good Corporate Governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>.</li> <li>• Melakukan <i>Good Corporate Governance Self Assessment</i>.</li> <li>• Melakukan penyempurnaan pelaksanaan serta pedoman tata kelola perusahaan.</li> </ul>

Penjelasan dari setiap tahap adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, kebijakan untuk menanamkan budaya GCG pada seluruh jenjang organisasi dan setiap kegiatan usaha sangat penting karena merupakan fondasi dari keseluruhan penerapan GCG di Bank BPD DIY. Kebijakan yang dibentuk terdiri dari 9 (sembilan) faktor yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
3. Pembentukan, susunan anggota dan pelaksanaan tugas komite-komite.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern.
5. Penerapan manajemen risiko.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

7. Rencana strategis bank.
8. Aspek transparansi kondisi bank.
9. Etika perilaku pengurus dan pegawai bank.

b. Tahap Implementasi

Dalam tahap implementasi, PT. Bank BPD DIY melakukan upaya manajemen untuk melakukan perubahan. Pada tahap implementasi ini PT. Bank BPD DIY melakukan sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi tentang budaya GCG disampaikan kepada seluruh jajaran struktural maupun fungsional unit kerja yang ada. Pada tahap internalisasi, PT. Bank BPD DIY memastikan pelaksanaan GCG bukan sekedar dipermukaan, namun benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

c. Tahap Evaluasi

Setelah melakukan implementasi GCG, maka akan diperoleh hasil penilaian Bank Indonesia atas pelaksanaan GCG. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan- perbaikan atas pelaksanaan GCG. Selain penilaian dari Bank Indonesia, setiap semester bersamaan dengan penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dilakukan GCG Self Assessment, yang meliputi pengukuran dan pemetaan penerapan GCG sehingga dapat diidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil dari proses tersebut, PT. Bank BPD DIY melakukan penyempurnaan pelaksanaan serta pedoman tata kelola perusahaan.

## 5. 2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan good corporate governance dan pelaporan internal Adapun implementasi penerapan prinsip ini adalah sebagaimana penulis uraikan terhadap beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan *transparency* yaitu pertanyaannya apakah perusahaan (Bank BPD DIY) sudah mengembangkan system akuntansi berdasarkan standar yang berlaku, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY Bapak David Ilyas Saputra,

Sudah, Bank BPD DIY Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan Pengawasan

Hal ini juga terlihat bahwa selama tahun 2014-2016, Bank BPD DIY sebagai lembaga perbankan selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan GCG serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Menurut pengamatan saya selama penelitian, dijumpai bahwa bank ini sudah melakukan pengembangan sistem akuntansi yang dapat mendukung dan memperlancar aktivitas atau operasional bank sebagai mana yang diharapkan. Laporan tahunan Bank BPD DIY pun dengan mudah dapat diakses pada website resmi karena telah diunggah sehingga bisa dilihat oleh siapa saja dengan bebas.

Akuntansi adalah proses yang bertujuan menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya, atau yang berkepentingan terhadap perusahaan sebagai dasar menilai dan membuat keputusan. Pemakai informasi akuntansi tersebut dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1) Pihak Internal, Adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari, yaitu pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan membutuhkan informasi akuntansi karena dialah yang bertanggungjawab atas kemajuan perusahaan. Informasi dibutuhkan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan bisnis.

2) Pihak Eksternal, Adalah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan namun tidak terlibat secara langsung dalam membuat keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY sudah mengembangkan system akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku, dengan menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan Pengawasan. Hal ini telah sesuai dengan harapan dari penerapan GCG yaitu kewajiban bagi para pengelola untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (reliable) dan berkualitas.

### 5.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Laporan keuangan harus dilaporkan dengan tepat waktu dan jelas. Maksudnya bahwa Laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, sehingga jelas batas pelaporan dari posisi Asset, hutang, modal, pendapatan, dan biaya dari perusahaan yang akan dilaporkan. Waktu penyajiannya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam batas waktu yang wajar, dalam arti tidak terlalu terlambat sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang sifatnya manajerial maupun teknis. Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan harus ditampilkan dengan cara sedemikian rupa hingga jelas

dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pembaca laporan keuangan. Dengan demikian, para pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang relevan dari informasi yang dibaca.

Kemudian pertanyaan selanjutnya pada Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY adalah ”Apakah perusahaan anda sudah mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan”. Dan hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY mengatakan bahwa :

“PT. Bank BPD DIY mengungkapkan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu diterbitkannya laporan bank dengan tepat waktu setiap tahunnya dengan substansi yang sangat jelas mulai dari, Profil, analisis & pembahasan manajemen, laporan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan (GCG), tata kelola unit usaha syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan teknologi informasi, dan laporan audit independent.”

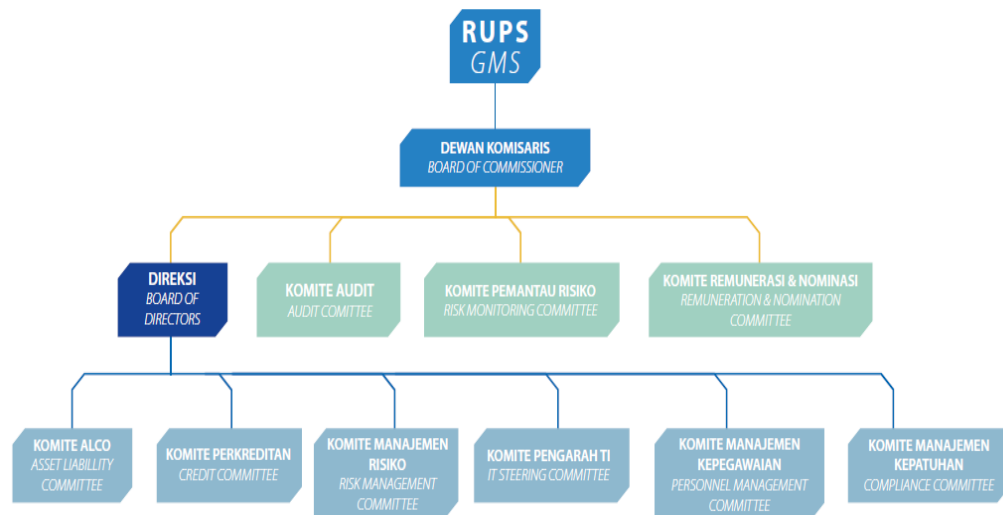
Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan BI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan *Good Corporate Governanace* pada Bank Umum dan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan GCG, baik secara tersendiri maupun digabungkan dalam laporan keuangan

PT. Bank BPD DIY mengungkapkan informasi secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan selalu diterbitkannya laporan bank dengan tepat waktu setiap tahunnya dengan substansi yang sangat jelas mulai dari, Profil, analisis & pembahasan manajemen, laporan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan (GCG), tata kelola unit usaha syariah, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), laporan teknologi informasi, dan laporan audit independent. Hal ini sejalan dengan kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Lebih dalam bahwa, informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, tidak boleh ada hal-hal tertentu yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, maupun ditunda-tunda pengungkapannya. Selanjutnya ketika peneliti menanyakan Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasional PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY menjelaskan bahwa :

“Oh ya jadi akuntabilitas itu kan dilaksanakan sebagai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Sebenarnya hal ini tercermin pada Rapat umum pemegang saham (RUPS) itu mas, RUPS ini merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.



**Gambar 5.4**  
**Struktur Organisasi GCG PT. Bank BPD DIY**



Sumber: Laporan Tahunan Bank BPD DIY 2016

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam operasional PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dilaksanakan sebagai kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. RUPS ini merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS pemegang saham menggunakan haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.

#### 5.4. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Berkaitan dengan prinsip ini, maka seluruh anggota Dewan Komisaris Bank (BPD) DIY telah mengikuti fit and proper test dimaksud dan semuanya telah pula dinyatakan lulus oleh Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan cukup banyak di bidang perbankan dan di bidang keuangan, baik di dalam maupun diluar negeri. Hal ini

tercantum dan dapat dilihat pada curriculum vitae masing-masing, yang menggambarkan pengalaman mereka dibidang perbankan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir dan lain sebagainya

Untuk mendukung terlaksananya penerapan GCG di Bank BPD DIY yang independen dan transparan, Bank BPD DIY telah menunjuk pula konsultan, untuk melakukan review dan *reassessment* serta memberikan bahan masukan terhadap pelaksanaan penerapan GCG selama ini, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya apakah perusahaan selalu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY mengatakan bahwa :

“Iya, rapat umum pemegang saham (RUPS) dilaksanakan setiap tahunnya, untuk tahun 2014 dilakukan sebanyak 7 kali, tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 kali, dan tahun 2016 dilaksanakan 1 kali, untuk rinciannya nanti silahkan lihat di laporan bank BPD DIY ya.

**Tabel 5.2**  
**Rapat Umum Pemegang Saham 2014**

Tanggal   Date	No.	Materi   Material
17 Januari 2014   January 17, 2014	1.	Membahas tentang surat pengunduran diri Direktur Utama PT. Bank BPD DIY.   <i>Discussing about the letter of resignation President Director of PT. Bank BPD DIY.</i>
	2.	Lain-lain   <i>Other material.</i>
27 Januari 2014   January 27, 2014	1.	Penugasan Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan dan mengusulkan calon direksi   <i>Assignment of BOC to the Nomination and Remuneration Committee to prepare and propose candidates for directors.</i>
	2.	Penugasan Direksi yang ada untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam hal Direksi baru belum terbentuk   <i>Assignment of the existing Board of Directors to carry out his duties and in the case of a new Board of Directors has not been formed.</i>
14 Maret 2014   March 14, 2014	1.	Laporan Dewan Komisaris tentang hasil seleksi calon Direksi PT. Bank BPD DIY   <i>BOC's report on the results of selection of candidates for the Board of Directors of PT. Bank BPD DIY.</i>
25 Maret 2014   March 25, 2014	1.	Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY, persetujuan neraca, perhitungan laba/rugi untuk tahun buku 2013   <i>The accountability report of Directors and Board of Commissioners of PT. Bank BPD DIY, approval of the balance sheet, the profit / loss for the financial year 2013.</i>
	2.	Pengesahan setoran modal, pembagian deviden dan Dana Pembangunan Daerah   <i>Ratification of the capital injection, the distribution of dividends and the Regional Development Fund.</i>
	3.	Penunjukan Auditor   <i>Auditor designation.</i>
	4.	Lain-lain   <i>Other material.</i>
23 April 2014   April 23, 2014	1.	Penetapan keputusan pergantian Direktur Utama   <i>Decision making on turn of President Director</i>
	2.	Pembatasan kebijakan strategis kepada Plt. Direktur Utama   <i>Restrictions strategic policy to the temporary substitute of President Director.</i>
21 Agustus 2014   August 21, 2014	1.	Pemberhentian dengan hormat Direksi yang sedang bertugas   <i>Honorable discharge the Board of Directors who was on duty.</i>
	2.	Penetapan Direksi baru secara definitif untuk periode 2014 - 2018   <i>Determination of the new Board of Directors definitively for the period 2014 - 2018</i>
16 Desember 2014   December 16, 2014	1.	Pengesahan setoran modal masing-masing pemegang saham   <i>Ratification of the capital contribution of each shareholder.</i>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2014

**Tabel 5.3**  
**Rapat Umum Pemegang Saham 2015**

Tanggal Pelaksanaan <i>date</i>	Agenda RUPS <i>GMS Agenda</i>	Keputusan RUPS <i>GMS Decision</i>
16 Maret 2015 <i>March 16, 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Laporan Keuangan <i>Approval of the Financial Statements</i></li> <li>• Pengesahan Modal <i>Approval of capital</i></li> <li>• Penunjukan KAP <i>The appointment of public accountant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengesahkan Laporan Keuangan <i>Ratify Financial Statement</i></li> <li>• Mengesahkan Modal <i>Approving capital</i></li> <li>• Menunjuk KAP <i>Approving public accountant</i></li> </ul>
28 Desember 2015 <i>December 28, 2015</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengangkat Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Board of Supervisor Inauguration</i></li> <li>• Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan <i>Revising chapter 18 about Limited Liability Company basic budget</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dan mengangkat kembali dewan pengawas syariah <i>Assigning and re-inaugurate Supervisory Board of Sharia</i></li> <li>• Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan tentang penggunaan laba dan pembagian dividen <i>Revising chapter 18 of Limited Liability Company basic budget regarding the management of profit and dividends distribution</i></li> </ul>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2015

**Tabel 5.4**  
**Rapat Umum Pemegang Saham 2016**

Tanggal Pelaksanaan <i>date</i>	Agenda RUPS <i>GMS Agenda</i>	Keputusan RUPS <i>GMS Decision</i>
08 April 2016 <i>April 08, 2016</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Laporan Keuangan <i>Approval of the Financial Statements</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengesahkan Laporan Keuangan <i>Ratify Financial Statement</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Modal <i>Approval of capital</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengesahkan Modal <i>Approving capital</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjukan KAP <i>The appointment of public Accountant</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjuk KAP <i>Approving public accountant</i></li> </ul>

Sumber: Laporan Tahunan BPD DIY 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memberikan persetujuan dan menerima penuh pertanggungjawaban Direksi atas pencapaian kinerja perusahaan serta menyetujui laba yang diperoleh untuk dibagikan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembayaran dividen, disamping telah memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Akuntan Publik. Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham, dan tugasnya adalah memantau dan mengawasi

pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam mengelola Bank, agar selalu mengacu atau sesuai dengan tujuan dan strategis bisnis yang telah ditetapkan. Tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya adalah melakukan pengawasan terhadap temuan audit intern dan ekstern untuk memastikan bahwa semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.

Laporan keuangan suatu perusahaan dapat dilaporkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi yang memenuhi syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dalam rangka mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban perusahaan sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dimana keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY selalu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Rapat umum pemegang saham (RUPS) dilaksanakan setiap tahunnya, untuk tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 7 kali, tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 kali, dan tahun 2016 dilaksanakan 1 kali. Hal ini didukung oleh teori bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan). Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan perusahaan.

Selanjutnya dalam menerapkan Prinsip Pertanggungjawaban ini Bank BPD DIY Juga melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi

yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan. Dewan Direksi sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY terlihat dengan berperan untuk memutuskan berjalannya program CSR, yang lebih berkaitan langsung dengan program-program yang dilakukan oleh Bank BPD DIY. Hal ini sejalan dengan teori bahwa perusahaan yang memiliki dewan direksi yang lebih profesional akan lebih banyak mengungkapkan CSR.

Stakeholder adalah semua pihak, internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh stakeholder terhadap pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY adalah stakeholders internal jelas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yaitu pemegang saham ada pada RUPS dan Rapat dewan direksi, tapi kalau stakeholders eksternal seperti nasabah, komunitas, ataupun pers hanya kita libatkan dalam kegiatan CSR karena itu kan juga merupakan tanggung jawab kita. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder adalah bahwa stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis

Untuk pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR proporsinya lebih banyak dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham lebih kepada pengambilan keputusan yang sifatnya berkaitan langsung terhadap keberlangsungan berjalannya perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Dewan

Komisaris Independen menjadi faktor pada pengungkapan CSR. Keberadaan Dewan Komisaris Independen dengan wewenang yang dimiliki, diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat. Dewan Komisaris Independen akan cenderung memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR perusahaan yang lebih luas

Pelaksanaan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dimulai tahun 2008. Pelaksanaan program CSR Bank BPD DIY mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.

Komitmen dan kepedulian PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY terhadap Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility) merupakan kontribusi PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank, maka PT. Bank BPD DIY bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagilingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan hidup (alam). Pada tahun 2014 PT. Bank BPD DIY mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* sebesar Rp.1.303.607.708,- (satu miliar tiga ratus tiga juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan rupiah) dan Tahun 2015, biaya

CSR dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) diambilkan dari pos biaya non operasional lainnya. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan CSR sampai Desember 2015 sebesar Rp. 1.816.668.361,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Dalam rangka mendukung kegiatan sosial, pengembangan lingkungan hidup dan pendidikan. Pemberian dana CSR untuk kegiatan tersebut diharapkan menjadi suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan berkesinambungan. Ketika peneliti menanyakan Bagaimana pengaruh stakeholder terhadap pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY?” Hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY menjelaskan bahwa”

“Stakeholders yg mana dulu ini mas, kalau stakeholders internal jelas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yaitu pemegang saham ada pada RUPS dan Rapat dewan direksi, tapi kalau stakeholders eksternal seperti nasabah, komunitas, ataupun pers hanya kita libatkan dalam kegiatan CSR karena itu kan juga merupakan tanggung jawab kita. Itu biasa kita lakukan dengan melibatkan dalam sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan, pemberian bantuan dan kegiatan-kegiatan CSR lainnya.”

Pengaruh stakeholder terhadap pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY berpengaruh dengan melibatkan dalam sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan, pemberian bantuan dan kegiatan-kegiatan CSR lainnya

Selanjutnya juga ditanyakan “Bagaimana Proporsi pengaruh antara Dewan Direksi dan Stakeholder dalam pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dan kapan pelaksanaan program atau



kegiatan CSR di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dimulai? Hasil wawancara dengan Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY menjelaskan bahwa

“Untuk pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR proporsinya lebih banyak dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris atau pemegang saham lebih kepada pengambilan keputusan yang sifatnya berkaitan langsung terhadap keberlangsungan berjalannya perusahaan, untuk pelaksanaan CSR kita sudah mulai sejak tahun 2008 mas.

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan CSR Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Grup Corporate Social Responsibility sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0270/OM 1006 tanggal 05 September 2011 tentang Grup Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Bank BPD DIY.

Pelaksanaan program CSR Bank BPD DIY mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.

Peneliti menanyakan “Apakah ada Prosedur yang mengatur waktu pelaksanaan CSR perusahaan? Bila ya, bagaimana prosedur tersebut dilaksanakan? Dan Berapa besar kontribusi Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dalam meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon progo tahun 2015-2016?

“kalau untuk prosedur waktu pelaksanaannya secara tertulis gitu tidak ada mas karena pelaksanaannya kan nanti dirapatkan dulu oleh dewan direksi, yang jelas arah pelaksanaan CSR Bank BPD DIY dibagi atas 4 bidang tanggung jawab sosial, pertama Tanggung Jawab

Terhadap Masyarakat (Pengembangan dan Sosial Kemasyarakatan), kedua Tanggung Jawab Terhadap Pegawai dan K3, kemudian Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Nasabah, dan terakhir Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan”

Selanjutnya ketika peneliti bertanya Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap pengambilan keputusan program atau kegiatan CSR di PT Bank (BPD) DIY, Bagian Unit Humas dan Sekretariat Direksi Bank BPD DIY menjelaskan bahwa :

“Dewan direksi kan juga sebagai organ perusahaan mas, jadi disini mereka juga berperan untuk memutuskan berjalannya program CSR, justru mereka yang lebih berkaitan langsung dengan program-program yang dilakukan oleh Bank BPD DIY termasuk CSR ini, mereka juga membahas CSR dalam rapatnya, nanti coba lihat saja di laporan itu ada rinciannya tanggal berapa saja mereka rapat dan kapan saja mereka membahas hal yang berkaitan dengan CSR, kalau rapat Direksi itu lebih sering mas dibanding rapat umum pemegang saham.”

Data yang peneliti dapatkan dari Laporan Tahunan Bank BPD DIY melakukan rapat sebanyak 36 kali pada tahun 2014, 54 kali pada tahun 2015, dan 38 kali pada tahun 2016. Dari rapat yang dilakukan diatas dapat terealisasi berbagai macam kegiatan CSR. Program-program CSR sosial kemasyarakatan Bank BPD DIY dilakukan secara berkesinambungan, yang terdiri dari 4 sektor fokus pelaksanaan yaitu:

1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Kesehatan
3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi
4. Sektor UKM Center

Uraian pelaksanaan kegiatan CSR selama tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut :

## **Tahun 2014**

### **1. Sektor Pendidikan**

Kegiatan sektor pendidikan meliputi pemberian bantuan pendidikan untuk pelajar yang tidak mampu, pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan, pelestarian budaya daerah, dan penguatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Kegiatan sektor pendidikan yang telah dilaksanakan yaitu:

- Kegiatan dialog budaya dan gelar seni sebanyak 4 (empat) kali di Kepatihan bekerja sama dengan komunitas “Yogya Semesta”.

- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk 275 siswa dari kalangan tidak mampu di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.

- Bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu.

- Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan kepada 81 mahasiswa universitas/ perguruan tinggi di wilayah DIY dari keluarga berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

### **2. Sektor Kesehatan**

Kegiatan sektor kesehatan meliputi pengadaan sarana kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk penguatan akses masyarakat terhadap

layanan kesehatan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan sektor kesehatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan berupa mobil ambulance untuk PMI Kabupaten Sleman.
- Bantuan berupa mobil ambulance untuk PMI Kota Yogyakarta.

### 3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi meliputi stimulus untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, perbaikan/peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemulihan kondisi masyarakat, bantuan kebutuhan fisik, serta bantuan finansial. Kegiatan sektor lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan yaitu :

- Bantuan pompa hidran untuk Desa Purwosari Girimulyo Kulon Progo, diberikan kepada pengelola Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) “Tirto Katon Sari” yang berada di Desa Purwosari Girimulyo Kulon Progo.

- Penghijauan wilayah Gunungkidul yang dilaksanakan di dua tempat wisata, yaitu Baron Tekno Park dengan penanaman 10.000 pohon sengon dan 3.000 pohon jati, serta di kawasan Embung Sriten Desa Pilangrejo Nglipar dengan penanaman 1.000 bibit pohon manggis.

- BPD DIY Go Green yang dilaksanakan dalam rangka HUT ke-53 PT. Bank BPD DIY. Program yang dilaksanakan berupa penghijauan lingkungan dengan penanaman 2.000 bibit Pohon Mahoni. Lokasi penanaman tersebar di beberapa tempat antara lain :

1. Kabupaten Sleman di Telogo Nirmolo Kaliurang dan Stadion Klebengan
  2. Kabupaten Kulon Progo di lingkungan Tugu Potlot dan ruas jalan Brosot-Sentolo
  3. Kabupaten Bantul di Stadion Sultan Agung, Komplek Pemda Baru Manding, ruas jalan Kabupaten, lingkungan Kampus UMY, lingkungan Pasar Niten, dan 5 (lima) Sekolah Adiwiyata
  4. Kota Yogyakarta di Stadion Kridosono, bantaran Sungai Winongo, dan Lapangan Kopertis
- Bantuan peralatan untuk kelompok pengrajin keris “PUROSANI” Imogiri Bantul.

Kelompok pengrajin keris “PUROSANI” terdiri dari masyarakat Desa Banyusumurup Girirejo Imogiri Bantul yang bermata pencaharian sebagai pengrajin keris dan pedok. Saat ini produksi keris dan pedok terkendala oleh terbatasnya peralatan untuk membuat kerajinan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, PT. Bank BPD DIY memberikan bantuan berupa peralatan untuk memproduksi keris dan pedok.

#### 4. Sektor UKM Center

Kegiatan sektor UKM Center meliputi dukungan bagi peningkatan peran UKM Center di masyarakat. Kegiatan sektor UKM Center yang telah dilaksanakan meliputi 4 (empat) kali pameran produk UMKM dan 1 (satu)

kali seminar UKM Center. Uraian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Jogja Istimewa Craf Expo merupakan kegiatan pameran kerajinan UKM dan budaya nusantara yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANASDA) DIY pada tanggal 17-22 Juni 2014 di Alun-alun Utara Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan satu nasabah binaan dari Cabang Bantul, yaitu Pari Raja yang mempunyai usaha kerajinan dari kulit ikan pari.

- Pameran Festival Malioboro 2014 mengusung tema Tourism-Heritage-Culinary & Youth Entrepreneur Festival. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 20-22 Juni 2014 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan tiga nasabah binaan, yaitu :

- a. Greavy Susanto “Greavy Batik” : perdagangan batik, nasabah Kantor Cabang Senopati
- b. Edi Tiawan “Kusuma Jaya Batik Tulis & Cap”: produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Sleman
- c. Zazid : produk kulit ikan pari, nasabah Kantor Cabang Sleman

- Pameran Pembangunan 2014 yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY pada tanggal 14-18 Agustus 2014 di Exhibition Hall Gedung Kotak Lantai 1 Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan empat nasabah binaan, yaitu :

- a. Siwi Lestari : Kerajinan vinyl, nasabah Kantor Cabang Sleman
- b. Nurzazid : Produk kulit ikan pari, nasabah Kantor Cabang Sleman
- c. Murtini : Batik Sembung, produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Wates
- d. Tusiyah : Tas rajut, nasabah Kantor Cabang Wates

- Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN Expo) 2014 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 11-14 September 2014 di Atrium Galeria Mall Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan dua nasabah binaan, yaitu :

- a. Siwi Lestari “Craft Shodia” : kerajinan vinyl, nasabah Kantor Cabang Sleman
- b. Nur Alifah/Edi Tiawan “Kusuma Jaya Batik”: produksi batik tulis dan cap, nasabah Kantor Cabang Sleman - Seminar UKM Center yang mengusung tema “UKM Naik Kelas Menyongsong MEA 2015”. Seminar dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 di Hall lantai 7 Kantor Pusat PT. Bank BPD DIY. Jumlah peserta yang hadir dalam seminar ini berjumlah 86 orang, yaitu nasabah UMKM Binaan PT. Bank BPD DIY, pelaku usaha, pengelola koperasi, kampus, asosiasi dan komunitas bisnis, LSM, dan mahasiswa. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Wildan Muhammadiyah (Pamella Group), Cahyadi Joko Sukmono (Forbiz Indonesia), dan Sukarman (Sidji Batik).

## **Tahun 2015**

### **1. Sektor Pendidikan**

- Bantuan pendidikan (beasiswa) kepada siswa SMA/SMK Bantuan ini diberikan kepada 162 siswa-siswi di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Bantuan yang diberikan berupa tabungan pendidikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang disalurkan kepada siswa-siswi setingkat SMA/SMK sampai dengan lulus sekolah, dengan tujuan untuk membantu biaya pendidikan untuk siswa tidak mampu, sehingga diharapkan siswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SMA/SMK. Penyaluran dilakukan setiap semester Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bantuan ini disalurkan melalui Kantor Cabang Bank BPD DIY dengan rincian sebagai berikut :

- Cabang Sleman : 49 siswa
- Cabang Bantul : 49 siswa
- Cabang Wates : 12 siswa
- Cabang Wonosari : 27 siswa
- Cabang Syariah : 6 siswa
- Cabang Utama : 10 siswa
- Cabang Senopati : 9 siswa



- Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu. Beasiswa kepada Winda Nur Afiani diberikan sejak tahun 2013, yaitu sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswi di Fakultas Biologi UGM, dan akan diberikan sampai lulus kuliah. Yang bersangkutan merupakan siswa berprestasi yang berasal dari SMK Tunas Medika Jakarta Timur yang beberapa kali berhasil menjadi juara Olimpiade Science Terapan Nasional (OSTN) dan English Speech Kontes Tingkat Propinsi DKI Jakarta. Karena terserang stroke, ayahnya terkena PHK sehingga tidak dapat membiayai keluarga, sedangkan penghasilan ibunya sebagai pembuat kue juga kurang memadai. Keluarganya saat ini bertempat tinggal di wilayah Siyono Tengah Logandeng Playen Gunungkidul. Pada tahun 2015 bantuan yang diberikan berupa uang buku Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester untuk semester IV dan V.
- Bantuan dana pendidikan mahasiswa Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan kepada 25 mahasiswa S1 dari keluarga yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan IPK minimal 2,75 yang tersebar di 7 universitas/perguruan tinggi di wilayah DIY. Beasiswa ini akan diberikan sampai mahasiswa tersebut lulus. Tujuannya adalah untuk memperingan beban biaya pendidikan yang ditanggung, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang

pendidikan S1. Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun.

- Aktivasi Perdana Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar) SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Dana CSR yang dialokasikan untuk aktivasi perdana Tabungan SimPel tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan produk Tabungan SimPel kepada para pelajar dari PAUD, TK, SD, SMP,SMA, SMK atau yang sederajat dengan cara pembukaan perdana Tabungan SimPel sejumlah 2.740 rekening @ Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang tersebar di seluruh kantor cabang dengan perincian sebagai berikut :
  - Cabang Utama : 225 rekening
  - Cabang Wonosari : 342 rekening
  - Cabang Wates : 224 rekening
  - Cabang Bantul : 992 rekening
  - Cabang Sleman : 439 rekening
  - Cabang Senopati : 217 rekening
  - Cabang Syariah : 301 rekening
- Beasiswa mahasiswa INSTIPER Yogyakarta

Beasiswa ini diberikan untuk 10 mahasiswa INSTIPER Yogyakarta dari keluarga yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan, dengan IPK minimal 3,00. Beasiswa diberikan sekali dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Tujuannya adalah untuk memperingan beban biaya pendidikan yang ditanggung.

## 2. Sektor Kesehatan

- PIPANISASI di Sarimulyo, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo  
Pedukuhan Sarimulyo termasuk dalam wilayah Kecamatan Samigaluh yang merupakan kawasan perbukitan Menoreh di Kulon Progo. Pedukuhan ini terdiri dari 36 KK dengan jumlah jiwa 104 orang. Daerah ini selalu mengalami kekeringan di kala musim kemarau. Saat musim kemarau untuk mencukupi kebutuhan air bersih sangat bergantung pada sumber air (mata air) dari sebuah sungai yang berjarak +/- 2 km dari permukiman warga. Jika kemarau panjang, sumber air tersebut juga mengalami kekeringan. Untuk mengatasi hal tersebut, warga harus mengambil air dari sumber air yang berjarak +/- 1 km dari lokasi sumber air yang pertama. Program pipanisasi ini dilakukan untuk mengalirkan air dari sumber mata air yang letaknya +/- 3 km dari rumah penduduk, dimana sumber air tersebut tidak kering di musim kemarau. Air tersebut dialirkan melalui pipa ke bak penampungan, kemudian baru dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Dengan program ini diharapkan masalah kelangkaan air yang setiap musin kemarau selalu melanda dusun tersebut dapat teratasi.

- Bantuan mobil ambulans

Bantuan berupa 3 (tiga) unit mobil ambulans diberikan kepada RSUD Wates, RSUD Panembahan Senopati Bantul, dan RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan dari pemberian mobil ambulans ini adalah untuk mendukung rumah sakit-rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga akan lebih cepat terlayani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesehatan dan kehidupan masyarakat.

- Sarana mandi cuci kakus (MCK) di Wukirsari, Cangkringan, Sleman.

Bantuan sarana mandi cuci kakus (MCK) ini diberikan kepada 12 (dua belas) keluarga yang tergolong tidak mampu di dusun Wukirsari Cangkringan Sleman melalui Panitia Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Cangkringan yang bekerja sama dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Cangkringan. Tujuan dari pembangunan sarana MCK ini adalah agar masyarakat yang tergolong tidak mampu dapat mempunyai fasilitas MCK yang layak agar kesehatan anggota keluarga dapat terjaga, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.

### 3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi

#### - Bantuan kepada debitur korban gempa bumi 2006

Bantuan diberikan untuk 8 (delapan) debitur Bank BPD DIY yang menjadi korban gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada tahun 2006. Bantuan yang diserahkan berupa bantuan finansial yang

bertujuan untuk memulihkan perekonomian debitur. Bantuan ini disalurkan melalui Kantor Cabang dengan rincian sebagai berikut :

- Cabang Sleman : 3 debitur Rp 24.981.934,00
- Cabang Senopati : 2 debitur Rp 120.060.377,00
- Cabang Bantul : 3 debitur Rp 247.203.603,00

- Pos pantau banjir lahar

Bantuan yang diberikan berupa 1 (satu) unit pos pantau induk dan 4 (empat) unit peralatan penunjang pos pantau di dusun Argomulyo, Cangkringan, Sleman. Pos pantau ini dibangun di pinggir sungai Opak. Tujuan pembangunan pos pantau dan bantuan peralatan penunjang ini adalah untuk memantau banjir lahar dingin Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi khususnya jika musim penghujan tiba, sehingga dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekitar dan para penambang pasir yang beraktivitas di sepanjang sungai. Dengan demikian dapat mengurangi dampak kerugian finansial dan mengantisipasi adanya korban jiwa.

#### 4. Sektor UKM Center

- (dua) kali Workshop UKM Center :
  - Penerapan SNI ISO 9001 bagi UMKM Workshop ini merupakan kerjasama antara UKM Center Bank BPD DIY dengan Forbiz Indonesia, Business Development Service (BDS), dan Badan

Standarisasi Nasional (BSN) yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Februari 2015 di Hall lantai 7 Kantor Pusat Bank BPD DIY. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran kepada UMKM di DIY untuk menerapkan ISO 9001 sebagai acuan dalam manajemen mutu produk, sehingga produk UMKM DIY dapat bersaing di pasar nasional maupun global. Workshop ini dihadiri oleh ±50 peserta yang terdiri konsultan bisnis di DIY (perwakilan dari beberapa kampus, asosiasi dan komunitas bisnis, LSM), UMKM binaan Bank BPD DIY, dan pegawai Bank BPD DIY.

- Enhancing Good Financial Management To Achieve Sustainable Success For SMES UKM Center Bank BPD DIY bekerjasama dengan PUM (Programma Uitzending Managers) Netherlands Senior Experts menyelenggarakan workshop guna meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM akan kebutuhan manajemen keuangan, sehingga diharapkan mereka sukses dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dasar para pelaku UMKM dalam menyusun rencana bisnis, rencana investasi, sistem pembukuan, dan laporan tahunan. Workshop ini diselenggarakan pada 10 April 2015 bertempat di Hall lantai 7 Kantor Pusat Bank BPD DIY, dan diikuti oleh ± 60 peserta yang terdiri dari pengusaha, pelaku bisnis mitra PUM Netherlands Senior Experts, dan UMKM binaan Bank BPD DIY.

- 1 (satu) kali Seminar UKM Center dengan tema “A-Z Sukses Dongkrak Penjualan” Seminar ini merupakan kerjasama antara UKM Center Bank BPD DIY dengan AMA (Asosiasi Manajemen Indonesia) DIY, yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2015 di Hall lantai 7 Kantor Pusat Bank BPD DIY. Seminar dihadiri oleh ±100 orang, yang terdiri dari UMKM binaan Bank BPD DIY, pengusaha, akademisi, trainer, dan pelaku bisnis lain. Tujuan dari seminar ini adalah agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan wawasan secara komprehensif terhadap aspek-aspek : organisasi, teamwork, selling process system, motivasi yang sistemik, perilaku konsumen dan kompetensi penjualan terkini, membangun spirit, habit, kemampuan, dan budaya profesional dalam persaingan global, serta meningkatkan kesadaran pentingnya strategi penjualan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

- Revitalisasi website UKM Center

Revitalisasi ini dilakukan dengan merubah nama dan menempatkan website UKM Center pada sub-domain bpddiy.co.id, dengan tujuan agar UKM Center Bank BPD DIY dapat lebih dikenal, lebih mudah diakses oleh seluruh nasabah serta calon nasabah dan juga sebagai identitas Bank BPD DIY.

- 7 (tujuh) kali Pameran UMKM

- Jakarta Marketing Week 2015 Jakarta Marketing Week 2015 merupakan kegiatan pameran yang diselenggarakan oleh MARKPLUS.INC

pada tanggal 6-12 Mei 2015 di Atrium Kota Kasablanka Mall, Jakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan 3 (tiga) nasabah binaan, yaitu :

- Batik Margaria : batik fashion, nasabah Cabang Senopati
- Batik Paradise : batik fashion, nasabah Cabang Senopati
- Ampyang Mete Umi : kuliner olahan kacang mete, nasabah Cabang Sleman.

Tujuan dari keikutsertaan ini adalah untuk mengenalkan produk yang inovatif dan berkualitas dari nasabah binaan, sehingga produknya dapat dikenal luas, serta mendapatkan pengetahuan dan networking.

- Invesda Expo 2015

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tanggal 28-31 Mei 2015 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan 2 (dua) nasabah binaan, yaitu :

- Keramik Pak Somo : kerajinan keramik, nasabah Cabang Bantul
- Batik Paradise : batik fashion, nasabah Cabang Senopati.

Tujuan dari keikutsertaan ini adalah sebagai ajang promosi, penguatan jaringan dan perluasan informasi kepada publik bagi nasabah binaan sehingga akan meningkatkan produktivitas dan pemasaran produknya ke level nasional.

- Festival Malioboro 2015



Pameran Festival Malioboro 2015 ini mengusung tema Tourism & Culinary Festival. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 24-26 Juli 2015 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan 2 (dua) nasabah binaan, yaitu :

- Dian Evianto “Dee Angel” : perdagangan tas rajut dan kulit, nasabah Cabang Senopati
- Bambang Wiratno “Giri Stone” :perdagangan dan pengolahan batu mulia, nasabah Cabang Senopati.

Tujuan dari keikutsertaan ini adalah untuk mengenalkan produk potensi kreatif inovatif dari nasabah binaan Bank BPD DIY, sehingga dapat membantu pemberdayaan UMKM untuk lebih dikenal di kalangan masyarakat yang lebih luas.

- Pameran Pembangunan 2015

Pameran Pembangunan 2015 ini mengusung tema “Ayo Kerja”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY pada tanggal 14-18 Agustus 2015 di Exhibition Hall Gedung Kotak Lantai 1 Taman Pintar Jl. Panembahan Senopati Yogyakarta. Dalam kegiatan ini UKM Center mengikutsertakan 2 (dua) nasabah binaan, yaitu :

- Sandal rajut “Kelo”: kerajinan sandal rajut, nasabah Cabang Sleman

- Batik Allusnan : produksi batik dan baju batik, nasabah Cabang Sleman. Tujuan dari keikutsertaan ini adalah sebagai salah satu kegiatan unjuk diri bagi nasabah binaan Bank BPD DIY, serta diharapkan menjadi interaksi positif dan kerjasama antar daerah, baik sesama peserta dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pemasaran produknya sehingga bermanfaat bagi perekonomian masyarakat dan bangsa.

- Jogja Fashion Week 2015

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemda DIY pada tanggal 26-30 Agustus 2015 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta. Dalam acara ini UKM Center mengikutsertakan 1 (satu) nasabah binaan yang bergerak di bidang fashion, yaitu Batik Allusnan dari Cabang Sleman. Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan nasabah binaan dapat menampilkan produk andalannya guna menarik investor dan pembeli potensial dari dalam maupun luar negeri.

- Gelar Produk Kreatif Nusantara (GPKN Expo) 2015

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY pada tanggal 3-6 September 2015 di Atrium Galeria Mall Yogyakarta. Dalam acara ini UKM Center mengikutsertakan 1 (satu) nasabah binaan yang bergerak di bidang fashion, yaitu Silla Fashion dari Cabang Utama. Tujuan dari keikutsertaan ini adalah untuk mempromosikan produk dari nasabah binaan kepada pembeli dan investor, baik dalam dan luar negeri, sehingga nasabah binaan mampu memperluas jaringan pemasaran serta

meningkatkan nilai pemasaran produknya agar dapat menembus pasar ekspor.

- HUT ke 70 RRI

Kegiatan ini diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta dalam rangka HUT ke 70 RRI pada tanggal 26-30 September 2015 di Komplek Auditorium RRI Yogyakarta Jl. Gejayan Yogyakarta. Dalam acara ini UKM Center mengikut sertakan 1 (satu) nasabah binaan yang bergerak di bidang olahan makanan, yaitu Olahan Salak Bu Sujarwati dari Cabang Sleman. Dengan ikut serta dalam kegiatan ini diharapkan nasabah binaan mampu memperluas jaringan pemasarannya dan meningkatkan hubungan bisnis antar pelaku usaha kreatif di Indonesia.

- Dana bergulir dan kompetisi wirausaha muda istimewa

Program dana bergulir dan kompetisi wirausaha muda istimewa ini merupakan program UKM Center bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Dana yang dialokasikan untuk Dana Bergulir adalah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk Kompetisi Wirausaha Muda Istimewa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Program Dana Bergulir tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada UMKM pemula dengan kriteria dan tingkat bunga tertentu yang ditetapkan oleh pihak UAD. Tujuan dari program ini adalah agar pelaku UMKM pemula yang belum bankable dapat mengakses pinjaman dalam rangka mengembangkan usahanya, sehingga dikemudian hari diharapkan dapat mengakses pinjaman dari perbankan. Sedangkan untuk program

Kompetisi Wirausaha Muda Istimewa diberikan kepada mahasiswa UAD yang menjadi pemenang dari kegiatan Kompetisi Wirausaha Muda Istimewa yang diselenggarakan oleh UAD. Tujuan dari program ini adalah agar mahasiswa yang bersangkutan mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi pengusaha yang mandiri.

### **Tahun 2016**

#### 1. Sektor Pendidikan

- Bantuan pendidikan (beasiswa) kepada siswa SMK/SMA

Bantuan ini diberikan kepada 229 siswasiswi di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Bantuan yang diberikan berupa tabungan pendidikan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu tahun yang disalurkan kepada siswa-siswi setingkat SMK/SMA sampai dengan lulus sekolah, dengan tujuan untuk membantu biaya pendidikan untuk siswa tidak mampu, sehingga diharapkan siswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di tingkat SMK/SMA. Penyaluran dilakukan setiap semester Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bantuan ini disalurkan melalui Kantor Cabang PT Bank BPD DIY dengan rincian sebagai berikut :

- Cabang Sleman : 50 siswa
- Cabang Utama : 10 siswa
- Cabang Syariah : 6 siswa

- Cabang Wonosari : 22 siswa
- Cabang Senopati : 34 siswa
- Cabang Bantul : 59 siswa
- Cabang Wates : 48 siswa

- Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk mahasiswa/perguruan tinggi.

- a. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi UGM berprestasi dari kalangan tidak mampu.

Beasiswa kepada Winda Nur Afiani diberikan sejak tahun 2013, yaitu sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswi di Fakultas Biologi UGM, dan akan di berikan sampai lulus kuliah. Winda Nur Afiani merupakan siswa berprestasi yang berasal dari SMK Tunas Medika Jakarta Timur yang beberapa kali berhasil menjadi juara Olimpiade Science Terapan Nasional (OSTN) dan English Speech Kontes Tingkat Propinsi DKI Jakarta. Karena terserang stroke, ayahnya terkena PHK sehingga tidak dapat membiayai keluarga, sedangkan penghasilan ibunya sebagai pembuat kue juga kurang memadai. Keluarganya saat ini bertempat tinggal di wilayah Siyono Tengah Logandeng Playen Gunungkidul. Pada tahun 2016 ini bantuan yang diberikan berupa uang buku Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 semester (semester VI dan VII).

- b. Bantuan dana pendidikan untuk 25 mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang tersebar di 7 (tujuh) perguruan tinggi di DIY.

Bantuan dana pendidikan ini diberikan kepada 25 mahasiswa S1 dari keluarga yang berpenghasilan tidak lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, dengan IPK minimal 2,75 yang tersebar di 7 universitas/ perguruan tinggi di wilayah DIY. Beasiswa ini akan diberikan sampai mahasiswa tersebut lulus. Tujuannya adalah untuk memperingan beban biaya pendidikan yang ditanggung, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1. Bantuan dana pendidikan mahasiswa diberikan sebesar @ Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun, dimana penyalurannya dilakukan tiap semester.

- a. Bantuan dana pendidikan untuk 5 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Merupakan bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada 5 mahasiswa UNY yang berprestasi namun kurang mampu dengan pemberian beasiswa sebesar @ Rp 3.000.000.- per semester sampai dengan lulus kuliah.

- b. Lomba Museum Speech Contest an program Tour d'Museum 06 bekerjasama dengan Jogja Museum Society.

Museum Speech Contest adalah lomba pidato berbahasa Inggris dengan tema museum yang diikuti mulai dari usia SD sampai mahasiswa dengan jumlah peserta 61 orang yang diselenggarakan tanggal 26 April – 15 Mei 2016. Sedangkan untuk program Tour d'Museum 06 adalah mengunjungi beberapa museum di Area KM 0, yaitu Museum Gedung Agung, Museum Benteng Vredenburg, dan Museum Sonobudoyo. Pengunjung dapat mengikuti tour ini secara gratis, dengan rute Jogja City

Mall (JCM) – Area KM.0, dan Area KM.0 - Jogja City Mall (JCM), yang diselenggarakan tanggal 12 – 15 Mei 2016.

- c. Bantuan fasilitas pendidikan untuk Sekolah Ramah Anak (SRA) SMP N 1 Minggir.

Merupakan bantuan yang diberikan kepada Sekolah Ramah Anak (SRA) SMP N 1 Minggir yang digunakan untuk perbaikan fasilitas fisik yang meliputi renovasi 3 kamar kecil, pengecatan lapangan basket, pengecatan 7 ruang kelas dan melukis mural.

## 2. Sektor Kesehatan

- PIPANISASI dan pembuatan bak penampungan air di Kecamatan Prambanan Sleman.

Kecamatan Prambanan merupakan daerah dengan keadaan geografis terdiri dari 60% perbukitan dan 40% dataran rendah. Permasalahan yang dihadapi untuk daerah perbukitan adalah kekeringan dan kekurangan air bersih. Saat ini sudah ada jaringan air bersih namun tidak semua warga dapat menikmati fasilitas tersebut karena belum semua pedukuhan dapat dilalui jaringan pipa. Oleh karena itu dana CSR Bank BPD DIY disalurkan untuk pembangunan jaringan pipa yang selama ini belum dilalui jaringan pipa di Kecamatan Prambanan yang meliputi 3 desa yaitu Desa Gayamharjo, Sambirejo, dan Sumberharjo. Proyek pipanisasi meliputi pembuatan 2 bak penampung dan 1 bak penyaring, pemasangan dan perbaikan pipa, pemasangan meteran, pembuatan sumur bor dan pengadaan pompa

- Pembuatan Bak Penampungan Air di Rongkop, Saptosari, dan Girisubo Gunung Kidul.

Kekeringan merupakan masalah klasik yang dihadapi di daerah Gunungkidul khususnya di Kecamatan Rongkop, Kecamatan Saptosari dan Kecamatan Girisubo. Pemberian bantuan droping air menjadi kegiatan ritual setiap tahunnya baik yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta yang peduli dengan kebutuhan dasar warga masyarakat. Akan tetapi ini hanya bisa sedikit mengurangi kebutuhan harian penduduk karena keterbatasan jumlah yang ada. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan air adalah dengan membangun bak penampungan air hujan atau lebih dikenal dengan PAH. Dalam rangka meringankan masalah kekeringan tersebut maka Bank BPD DIY dengan dana CSR memberikan bantuan pembuatan 8 bak PAH di tiga kecamatan yang berada di 8 desa/pedukuhan yaitu Desa Karangwun, Desa Melikan, Desa Bohol, Pedukuhan Pakel, Pedukuhan Legundi, Pedukuhan Pucung, Desa Nglindur dan Desa Jerukwudel.

- Bantuan 2 Unit Mobil Ambulan untuk PMI Kab Bantul dan PMI Kab Kulon Progo.

Bantuan 2 (dua) unit mobil ambulan untuk PMI Kabupaten Bantul dan PMI Kabupaten Kulon Progo ini adalah sebagai wujud nyata kepedulian Bank BPD DIY terhadap kesehatan masyarakat. Mobil ambulan ini akan digunakan oleh PMI untuk melayani masyarakat umum di wilayah Bantul dan Kulon Progo, yaitu meliputi pelayanan kesehatan masyarakat (balai



pengobatan), transfusi darah, ambulan gawat darurat, dan penanganan tanggap bencana.

- Bantuan untuk Relokasi Pasar Bendungan

Pasar Bendungan yang berlokasi di Wilayah Kulon Progo mengalami kebakaran yang menyebabkan 46 kios dan 364 kapling los tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga ada 345 pedagang yang terkena dampaknya. Berkenaan dengan hal tersebut Pemda Kulon Progo akan melakukan relokasi sementara pasar agar dapat digunakan lagi. Untuk membantu proses relokasi tersebut Bank BPD DIY memberikan bantuan melalui program CSR yang akan digunakan untuk pembangunan toilet umum, pembangunan sumur bor dan tower air, serta pembangunan tiang penerangan pasar di 13 titik (lokasi).

### 3. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi

- Bantuan Ternak kambing untuk Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo Gunungkidul.

Bantuan ini diberikan kepada Pondok Pesantren Al Hikmah Karangmojo Gunungkidul untuk digunakan dalam program pengembangan agrobisnis berupa peternakan kambing dengan penggunaan dana untuk pembelian 13 ekor kambing dan perbaikan kandang.

- Bina UKM

a. Bina UKM Berupa Bantuan Peralatan Membatik Untuk Kelompok Pengrajin Batik di Kretek dan Imogiri Bantul.

Bantuan dana CSR ini diberikan kepada Kelompok Batik Mulyo Rejeki di Kecamatan Kretek dan Kelompok Batik Tulis Sekar Arum di Imogiri Bantul. Dua kelompok ini memiliki persamaan yaitu merupakan kelompok pengrajin yang berada di dalam desa wisata. Dalam program wisata kreatif tersebut wisatawan dapat melihat proses membatik secara langsung di showroom kelompok-kelompok batik. Oleh karena itu Bank BPD DIY menyalurkan dana CSR untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif di sentra kerajinan batik pada 2 kelompok tersebut. Bantuan yang diberikan berupa peralatan membatik yang diharapkan akan meningkatkan produktifitas pengrajin batik sehingga meningkatkan perekonomian secara langsung melalui meningkatnya produksi batik maupun secara tidak langsung dengan meningkatkan jumlah wisatawan.

- b. Bina UKM berupa bantuan peralatan memproduksi keris untuk kelompok pengrajin pendok keris di Imogiri Bantul.

Bantuan ini diberikan kepada kelompok pengrajin keris Pamor Suminar berupa peralatan kerja untuk memproduksi keris seperti, gerinda tangan, bor, kompresor, gergaji, kopler dan sebagainya. Penambahan bantuan peralatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sehingga mampu mengangkat ekonomi para pengrajin keris kelompok Pamor Suminar.

- c. Bina UKM berupa bantuan peralatan tatah sungging untuk kelompok pengrajin tatah sungging di Imogiri Bantul.

Kelompok pengrajin tatah sungging Pakel Mandiri merupakan kelompok pengrajin yang memproduksi kerajinan dari kulit seperti wayang kulit, kipas lipat, hiasan dinding dan aneka souvenir dari kulit. Bantuan CSR akan digunakan untuk menambah peralatan kerja dan fasilitas pendukung pemasaran seperti, etalase aluminium kaca, tatah wayang, ganden, cat dasaran dan meja kursi. Dana ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi kelompok tatah sungging Pakel mandiri.

d. Hibah pada KUB Tiwi Manunggal di Hargosari Kokap Kulon Progo.

KUB Tiwi Manunggal merupakan kelompok usaha bersama yang memproduksi gula semut dengan memiliki anggota 100 orang. Bantuan yang diberikan berupa alat produksi yaitu mesin ayakan gula dan mesin penggiling gula untuk meningkatkan produksi gula semut. Saat ini KUB Tiwi Manunggal belum dapat memenuhi permintaan pasar akan gula semut, sehingga dengan adanya tambahan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pasar.

e. Desa binaan di Nglingo Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo.

Desa Wisata Nglingo merupakan desa wisata yang menawarkan panorama alam sebagai magnet bagi wisatawan. Desa yang terletak di Kecamatan Samigaluh Kulon Progo ini berada pada ketinggian 900-1000 mdpl sehingga menjadi menarik karena menyajikan wisata alam khas pegunungan yaitu kebun teh milik warga. Selain itu wisatawan juga dapat menikmati pemandangan

melalui gardu pandang. Untuk membantu peningkatan program wisata ini program Bank BPD DIY memberikan dana hibah dalam bentuk CSR yang akan digunakan untuk pelatihan dan pembangunan warung di kawasan kebun teh yang saat ini menjadi tujuan wisata. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan wisata dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Desa Nglingsgo

f. Bantuan Bibit Mangrove di Konservasi Mangrove Baros Bantul.

Kawasan hutan mangrove Baros merupakan wilayah yang berada pada peralihan antara ekosistem darat dan laut. Adanya pemanfaatan lahan secara berlebihan di wilayah pantai Baros menyebabkan banjir rob, abrasi, pergeseran muara sungai dan berkurangnya habitat hewan. Dampak lainnya adalah terancamnya lahan pertanian karena pengikisan baik oleh aliran sungai maupun gelombang laut serta tanaman yang kering akibat adanya pembatas antara darat dan laut sehingga garam dari air alut menempel pada dedaunan. Penanaman pohon mangrove bertujuan mengurangi dampak tersebut. Oleh karena itu Bank BPD DIY dengan program CSR memberikan bantuan dana yang akan digunakan untuk penanaman dan pemeliharaan mangrove di kawasan Baros untuk mencegah abrasi serta mendukung program pemerintah penanaman 1 miliar pohon sebagai tindakan preventif terhadap bencana alam. Penanaman dan pemeliharaan pohon mangrove ini juga dapat

mengembangkan eco wisata sehingga berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

g. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif BPRSW Dinsos DIY

Balai perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta merupakan UPTD Dinas Sosial DIY yang memberikan perlindungan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk membantu wanita dengan permasalahan sosial. Selama mengikuti proses rehabilitasi dan perlindungan sosial mereka diberi bekal ketrampilan agar setelah keluar dari BPRSW mampu menjadi wanita mandiri sesuai dengan ketrampilannya. Bantuan yang diberikan dari CSR Bank BPD DIY berupa program bantuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk peralatan untuk ketrampilan jahit, olahan pangan, dan tata rias/salon untuk para alumni BPRSW sehingga mereka dapat membuka usaha sesuai ketrampilan yang dimiliki dan dapat hidup mandiri.

h. Bantuan untuk Kelompok Desa Prima di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul.

Desa prima merupakan desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan para perempuan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif sehingga para perempuan tersebut dapat mandiri dan memperoleh penghasilan. Usaha produktif yang dijalankan antara lain pembuatan camilan, kelontong, ternak, warung makan, jahit, rias, dagang pasar, kue, gula

kelapa, minyak kelapa, tempe, catering, kerajinan tas, angkringan, dan empling mlinjo. Dana CSR dari Bank BPD DIY akan diberikan kepada masing masing kelompok yang kemudian dana tersebut akan digulirkan oleh kelompok kepada para anggotanya untuk modal usaha. Dengan hibah dana CSR ini diharapkan usaha yang saat ini dikelola oleh para anggota kelompok tersebut akan lebih meningkat sehingga tujuan program penanggulangan kemiskinan melalui usaha produktif dapat tercapai.

i. Pembangunan Fasilitas Taman Kuliner Gunung Kidul.

Bantuan yang diberikan berupa dana yang digunakan untuk pembangunan panggung pentas, los kios dan branding name di Taman Kuliner Gunungkidul. Dengan tambahan fasilitas ini diharapkan Taman Kuliner Wonosari menjadi sebuah lokasi aktifitas kuliner yang nyaman dan representative bagi masyarakat.

4. Sektor UKM Center

- Hibah dana Bergulir Penguatan Modal Untuk Wirausaha Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII).

Program ini merupakan salah satu dukungan Bank BPD DIY dalam mencetak wirausahawan muda unggul dari dalam kampus. Dana hibah akan diberikan kepada pemenang program pembinaan kewirausahaan mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan sebagian digunakan untuk program dana bergulir berupa pemberdayaan masyarakat kepada usaha UMKM di DIY

- Kompetisi Wirausaha Muda Istimewa Bekerja Sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Bank BPD DIY ikut berperan dalam Program Wirausaha Muda Istimewa yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta dalam bentuk pemberian dana hibah yang diberikan kepada 5 wirausahawan pemula terbaik yang diambil dari kompetisi Program Wirausaha Muda Istimewa. Dengan pemberian dana hibah ini diharapkan lebih memotivasi para wirausahawan pemula dikampus untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

#### 5.5 Independensi (*Independency*)

Bank Pembangunan Daerah DIY harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank perkreditan rakyat harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik dalam kegiatan operasional/investasi maupun dalam pembiayaan, Bank (BPD) DIY telah mempunyai kebijakan yang antara lain telah di atur dalam Kebijakan Umum Penanaman Dana/Pembiayaan yang pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian, kerjasama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, akan larangan adanya kaitan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Bank (BPD) DIY telah menjalankan prinsip Independensi ini dengan cara menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai

peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Penerapan prinsip *independency* pada Bank (BPD) DIY terlihat bahwa, tidak ada dominasi dari pihak lain baik itu LSM atau serikat buruh dan juga konsultan, selain itu adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang melibatkan semua pemegang saham. Untuk LSM atau serikat buruh tidak ada pengaruh yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan, misalnya mengenai mogok kerja buruh yang terjadi di beberapa kota – kota Indonesia yang meminta kenaikan upah minimum, hal tersebut tidak terjadi pada perusahaan. Untuk jasa konsultan dimana konsultan pajak hanya bertugas untuk melakukan penghitungan pajak perusahaan dan hanya sebatas memberikan saran atau masukan, konsultan pajak tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemegang saham terbesar tetapi berdasarkan diskusi dengan pemegang saham yang lain dalam rapat baik mayoritas maupun minoritas, dan beliau juga mengatakan perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya selain RUPS tahunan ada juga RUPS yang diadakan apabila ada hal mendesak misalnya apabila perseroan ingin mengganti susunan komisaris dan sebagainya. Pada rapat setiap pemegang saham baik itu pemegang saham mayoritas maupun minoritas tidak dibedakan dalam mengikuti rapat, selain itu setiap pemegang saham juga berhak memberikan pendapatnya. Rapat ini bertujuan agar keputusan yang diambil tersebut bersifat objektif dan tidak berdasarkan keputusan satu pihak saja.



## 5.6 Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip Kewajaran (*Fairness*) dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari adanya penggelapan, transaksi internal (*insider trading*) atau mungkin adanya *irregulatties* yang lain. Prinsip ini berkaitan dengan hak legal dan konraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membantu menetapkan batas dan parameter yang berkaitan dengan tujuan perusahaan yang telah dimandatkan kepada manajemen.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Pedoman Pokok Pelaksanaan 1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. 2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik

PT. Bank (BPD) DIY telah menerapkan prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

(1) Memperhatikan kepentingan stakeholder dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank.

(2) Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank (BPD) DIY telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

(3) Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang telah disusun oleh Bank (BPD) DIY.

(4) Prinsip kewajaran diterapkan dengan baik oleh Bank (BPD) DIY dengan penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit setiap tahun dan dinyatakan wajar dan Bank (BPD) DIY menyampaikan setiap masalah yang ada segera dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kewajaran ini adalah dengan ditampilkannya ikhtisar keuangan yang memuat seluruh data Asset, Liabilitas, Utang, Ekuitas, Laba, Pendapatan dan Beban Operasional, rasio keuangan dan lain-lain dalam Laporan Tahunan Bank BPD DIY.

5.7 Analisis Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG)

**Tabel 5.5**

**Analisis Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG)**

	2014	2015	2016
Kebijakan GCG	<p>9 Faktor, terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</li> <li>2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</li> <li>3. Pembentukan, susunan anggota dan pelaksanaan tugas komite-komite.</li> <li>4. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern.</li> <li>5. Penerapan manajemen risiko.</li> <li>6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.</li> <li>7. Rencana strategis bank.</li> <li>8. Aspek transparansi kondisi bank.</li> <li>9. Etika perilaku pengurus dan pegawai bank.</li> </ol>	<p>7 faktor , terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance</li> <li>2. Pedoman Kerja Organ Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite)</li> <li>3. Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai</li> <li>4. Pedoman Pelaksanaan Budaya Risiko</li> <li>5. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme</li> <li>6. Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank</li> <li>7. Pedoman lainnya</li> </ol>	<p>7 faktor, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris</li> <li>2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern</li> <li>3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern</li> <li>4. Penerapan manajemen risiko</li> <li>5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar</li> <li>6. Rencana strategis</li> <li>7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan</li> </ol>
<p>Pada Kebijakan GCG selama tahun 2014-2016 terlihat bahwa ada dinamika beberapa perubahan kebijakan GCG tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Pada tahun 2014 terdapat 9 faktor dalam kebijakan GCG, namun pada tahun 2015 dan 2016 faktor dalam kebijakan GCG dikurangi menjadi hanya 7 faktor. Yang tidak digunakan lagi dalam tahun 2016 yaitu faktor: Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank dan Pedoman lainnya.</p>			

Struktur organisasi	2014	2015	2016
Dasar hukum Struktur organisasi	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
Jabatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS</li> <li>2. Dewan Komisaris</li> <li>3. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite ALCO</li> <li>b. Komite Perkreditan</li> <li>c. Komite Manajemen Resiko</li> <li>d. Komite Pengarah TI</li> <li>e. Komite Manajemen Kepegawaian</li> <li>f. Komite Kepatuhan</li> </ol> </li> <li>4. Komite Audit</li> <li>5. Komite Pemantau Resiko</li> <li>6. Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS</li> <li>2. Dewan Komisaris</li> <li>3. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite ALCO</li> <li>b. Komite Perkreditan</li> <li>c. Komite Manajemen Resiko</li> <li>d. Komite Pengarah TI</li> <li>e. Komite Manajemen Kepegawaian</li> <li>f. Komite Kepatuhan</li> </ol> </li> <li>4. Komite Audit</li> <li>5. Komite Pemantau Resiko</li> <li>6. Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RUPS</li> <li>2. Dewan Komisaris</li> <li>3. Direksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komite ALCO</li> <li>b. Komite Perkreditan</li> <li>c. Komite Manajemen Resiko</li> <li>d. Komite Pengarah TI</li> <li>e. Komite Manajemen Kepegawaian</li> <li>f. Komite Manajemen Kepatuhan</li> </ol> </li> <li>4. Komite Manajemen Audit</li> <li>5. Komite Pemantau Resiko</li> <li>6. Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ol>

Dari sisi struktur organisasi, BPD DIY pada tahun 2014 dan 2015 menggunakan landasan hukum yang sama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Kemudian pada

tahun 2016, peraturan yang digunakan adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Berdasarkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013, RUPS meliputi RUPS Tahunan dan RUPS lainnya/Luar Biasa.

Ruang lingkup RUPS meliputi :

1. Penilaian laporan pertanggung jawaban Direksi.
2. Persetujuan serta pengesahan Neraca dan Rugi/Laba Bank.
3. Pemilihan/pencalonan, penilaian Direksi.
4. Penentuan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Saham yang meliputi Daftar Saham, pemindah tanganan saham, duplikat saham, dan sebagainya.
5. Pembahasan hal-hal yang prinsip dan mendasar bagi kelangsungan pengelolaan Bank.

**Tabel 5.6**  
**Pemegang Saham 2014-2016**

	2014	2015	2016
Pemegang saham	Hamengku Buwono X (Jabatan-Gubernur DIY )  Drs. H. Haryadi Suyuti (Jabatan-Walikota Yogyakarta)  Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. (Bupati Sleman)  Hj. Sri Surya Widati (Bupati Bantul)  Hj. Badingah S.Sos. (Jabatan- Bupati Gunungkidul)  dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – (Jabatan- Bupati Kulon Progo)	Hamengku Buwono X (Jabatan-Gubernur DIY )  Drs. H. Haryadi Suyuti (Jabatan- Walikota Yogyakarta)  Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. (Bupati Sleman)  Hj. Sri Surya Widati (Bupati Bantul)  Hj. Badingah S.Sos. (Jabatan- Bupati Gunungkidul)  dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – (Jabatan- Bupati Kulon Progo)	Hamengku Buwono X (Jabatan-Gubernur DIY )  Drs. H. Haryadi Suyuti (Jabatan-Walikota Yogyakarta)  Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. (Bupati Sleman)  Drs. H. Suharsono (Bupati Bantul)  Hj. Badingah S.Sos. (Jabatan- Bupati Gunungkidul)  dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – (Jabatan- Bupati Kulon Progo)
Pelaksanaan RUPS	7 kali	2 kali	1 kali

Tabel diatas menunjukkan para pemegang saham yang selama 3 tahun berhak untuk mengikuti dan mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yakni terdiri dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Walikota Kota Yogyakarta, Bupati Kabupaten Sleman, Bupati Kabupaten Bantul, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, dan Bupati Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2014, Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) kali, dengan uraian pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5.7****Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2014**

<b>Tanggal</b>	<b>No.</b>	<b>Materi</b>
17 Januari 2014	1.	Membahas tentang surat pengunduran diri Direktur Utama PT. Bank BPD DIY.
	2.	Lain-lain.
27 Januari 2014	1.	Penugasan Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan dan mengusulkan calon direksi
	2.	Penugasan Direksi yang ada untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam hal Direksi baru belum terbentuk.
14 Maret 2014	1.	Laporan Dewan Komisaris tentang hasil seleksi calon Direksi PT. Bank BPD DIY.
25 Maret 2014	1.	Laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY, persetujuan neraca, perhitungan laba/rugi untuk tahun buku 2013.
	2.	Pengesahan setoran modal, pembagian deviden dan Dana Pembangunan Daerah.
	3.	Penunjukan Auditor.
	4.	Lain-lain.
23 April 2014	1.	Penetapan keputusan pergantian Direktur Utama
	2.	Pembatasan kebijakan strategis kepada Plt. Direktur Utama
21 Agustus 2014	1.	Pemberhentian dengan hormat Direksi yang sedang bertugas.
	2.	Penetapan Direksi baru secara definitif untuk periode 2014 - 2018
16 Desember 2014	1.	Pengesahan setoran modal masing-masing pemegang saham.

Pada tahun ini para pemegang saham membahas beberapa agenda pada rapat umumnya yaitu antara lain tentang pembahasan mengenai surat pengunduran diri direktur utama, Penugasan Dewan Komisaris, Penugasan Direksi, mendengarkan laporan dewan komisaris, laporan pertanggung jawaban Direksi, pengesahan setoran modal, pembagian deviden, dan dana pembangunan daerah, penetapan keputusan pergantian direktur utama, pembatasan kebijakan strategis, pemberhentian dengan hormat direksi, penetapan direksi baru, dan pengesahan

setoran modal masing-masing pemegang saham.

Selama tahun 2015, RUPS dilaksanakan sebanyak 2 kali, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.8**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2015**

Tanggal Pelaksanaan	Agenda RUPS	Keputusan RUPS
16 Maret 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Laporan Keuangan</li> <li>• Pengesahan Modal</li> <li>• Penunjukan KAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengesahkan Laporan Keuangan</li> <li>• Mengesahkan Modal</li> <li>• Menunjuk KAP</li> </ul>
28 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengangkat Dewan Pengawas Syariah</li> <li>• Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan dan mengangkat kembali Dewan Pengawas Syariah</li> <li>• Mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan tentang penggunaan laba dan pembagian deviden</li> </ul>

Pada tahun 2015 ini Para pemegang saham melakukan pembahasan terkait Pengesahan laporan keuangan, pengesahan modal, penunjukan KAP, mengangkat dewan pengawas syariah, dan mengubah pasal 18 anggaran dasar perseroan, dengan keputusan menetapkan dan mengesahkan seluruh agenda pembahasan tersebut.

Selama tahun 2016, RUPS dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu :

**Tabel 5.9**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2016**

Tanggal Pelaksanaan	Agenda RUPS	Keputusan RUPS
08 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan Laporan Keuangan</li> <li>• Pengesahan Modal</li> <li>• Penunjukan KAP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengesahkan Laporan Keuangan</li> <li>• Mengesahkan Modal</li> <li>• Menunjuk KAP</li> </ul>



Pada tahun ini para *shareholders* hanya melakukan 1 kali rapat umum pemegang saham yaitu terkait dengan pengesahan laporan keuangan, pengesahan modal, penunjukan KAP.

Dari keseluruhan RUPS tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014 merupakan tahun yang memiliki paling banyak RUPS. Dalam tahun tersebut terjadi pergantian Direktur Utama pada PT. Bank BPD DIY, kemudian implikasi dari perubahan pejabat tersebut dilakukan pula pembatasan kebijakan strategis bagi Plt Direktur Utama serta penetapan Direksi baru periode 2014-2018.

#### **Pemegang Saham Bank BPD DIY**

Sampai akhir tahun 2016, Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

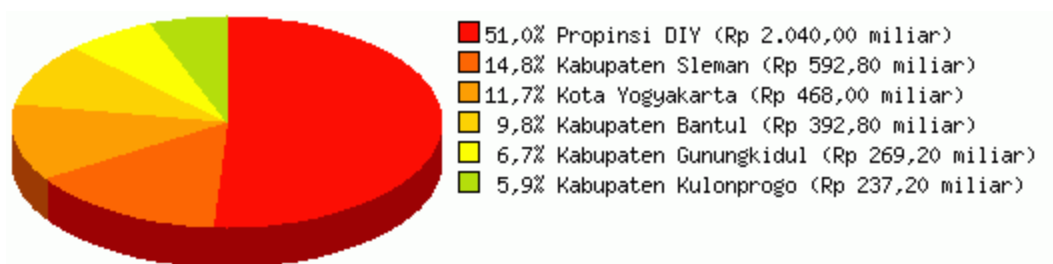
<b>Keterangan</b>	<b>Rupiah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>
Pemerintah Daerah DIY	283.500.000.000	38,54	283.500
Pemerintah Kota Yogyakarta	117.000.000.000	15,90	117.000
Pemerintah Kabupaten Sleman	148.200.000.000	20,15	148.200
Pemerintah Kabupaten Bantul	88.155.000.000	11,98	88.155
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	52.338.000.000	7,11	52.338
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	46.438.000.000	6,31	46.438

PT Bank BPD DIY dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000.000,-. Sampai

dengan akhir tahun 2016 modal dasar tersebut telah disetor penuh sebesar Rp 1.000.000.000.000,-.

Merujuk kepada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Akta Nomor: 40 tanggal 21 April 2017 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009719.AH.01.02.TAHUN 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka telah ditetapkan Modal Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 4.000.000.000.000,-. Komposisi kepemilikan modal sampai dengan akhir tahun 2016 dengan perincian sebagai berikut:

**Gambar 5.2**  
**Diagram Persentase Pemegang Saham BPD DIY sampai akhir 2016**



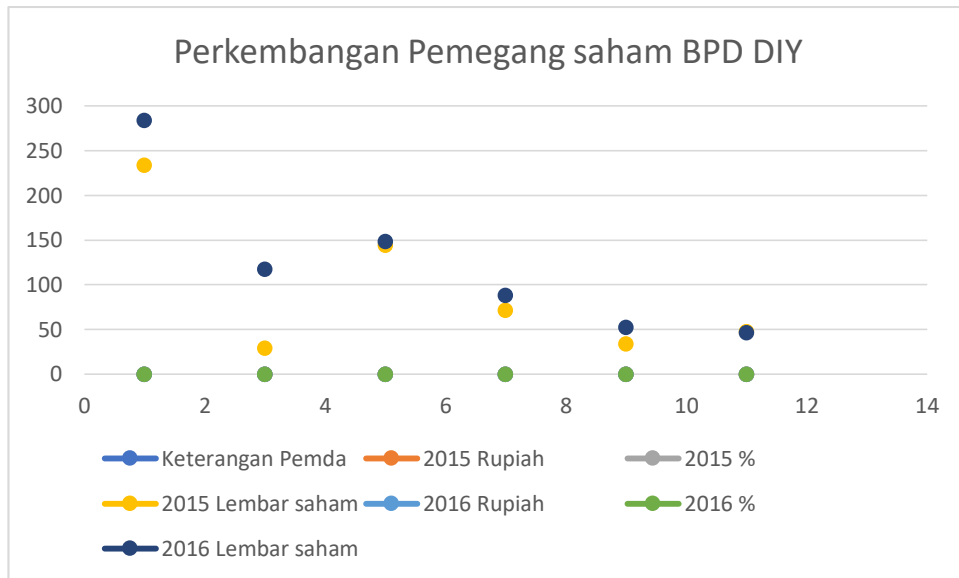
Berikut adalah rekapitulasi Pemegang Saham Bank BPD DIY pada tahun 2015 dan 2016

**Tabel 5.10**  
**Rekapitulasi Pemegang Saham Bank BPD DIY**

Keterangan	2015			2016		
	Rupiah	%	Lembar saham	Rupiah	%	Lembar saham
Pemda						
Pemerintah Daerah DIY	233.500.000.000	41,73	233.5	283.500.000.000	38,54	283.5
Pemerintah Kota Yogyakarta	29.246.000.000	5,23	29.246	117.000.000.000	15,90	117
Pemerintah Kabupaten Sleman	144.270.000.000	25,79	144.27	148.200.000.000	20,15	148.2
Pemerintah Kabupaten Bantul	71.555.000.000	12,79	71.555	88.155.000.000	11,98	88.155
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	33.576.000.000	6,00	33.576	52.338.000.000	7,11	52.338
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	47.338.000.000	8,46	47.338	46.438.000.000	6,31	46.438

Gambar 5.3

Diagram Perkembangan Pemegang Saham BPD DIY



Dari data diatas terlihat bahwa Pemerintah DIY merupakan pemegang saham terbesar di BPD DIY, disusul Kabupaten Sleman, dan diposisi ketiga besar adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

### 5.8 Hasil Self Assesment *Good Corporate Governance* (GCG)

BI mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 9/ 12 /DPNP Tanggal 30 Mei 2007, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PBI nomor 8/4/PBI/2006, yang telah diperbaharui dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 October 2006. BI – melalui SE tersebut – menjelaskan lebih rinci kelima prinsip GCG tersebut, yaitu sebagai berikut.

Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu

kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Urutan peringkat faktor *Good Corporate Governance* yang lebih kecil mencerminkan penerapan *Good Corporate Governance* yang lebih baik sebagai berikut:

Nilai Komposit (N)	Predikat Komposit
1,00 < N ≤ 1,79	Sangat Baik
1,80 < N ≤ 2,59	Baik
2,60 < N ≤ 3,39	Cukup Baik
3,40 < N ≤ 4,19	Kurang Baik
4,20 < N ≤ 5,00	Tidak Baik

Peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5.

**Tabel 5.11**

**Kategori Peringkat Good Corporate Governance (GCG)**

1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>kurang baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>tidak baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.

Berdasarkan data indeks GCG yang ada, berikut adalah analisis Indeks GCG. Pada tahun 2014 dengan total skor 1,88 *Good Corporate Governance* berada pada peringkat 2 ini bermakna mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *good corporate governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *good corporate governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen bank, begitu juga dengan tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 *Good Corporate Governance* dengan skor 1,80 peringkat 1 ini berarti mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan *good corporate governance* yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen bank.

**Tabel 5.12****Hasil Penilaian *Good Corporate Governance Self Assesment* Tahun 2014 - 2016**

No	Faktor Penilaian	2014			2015			2016		
		Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot	Skor (1-5)	Bobot	Skor Terbobot
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,92	10%	0,19	1,40	10%	0,14	1,92	10%	0,19
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,92	20%	0,38	1,92	20%	0,38	1,92	20%	0,38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	1,92	10%	0,19	1,40	10%	0,14	1,92	10%	0,19
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,4	10%	0,14	1,40	10%	0,14	1,4	10%	0,14
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1,92	5%	0,10	1,92	5%	0,10	1,92	5%	0,10
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,2	5%	0,11	2,20	5%	0,11	2,2	5%	0,11
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,4	5%	0,07	1,40	5%	0,07	1,4	5%	0,07
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal	2,2	7,50%	0,17	2,20	7,5%	0,17	2,2	7,50%	0,17
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure)	1,4	7,50%	0,11	1,92	7,5%	0,14	1,92	7,50%	0,14



10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	1,92	5%	0,29	1,92	15%	0,29	1,4	15%	0,21
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan internal	1,92	5%	0,14	2,72	5%	0,14	1,92	5%	0,1
		Total Skor : 1,88			Total Skor : 1,81			Total Skor : 1,80		
		Peringkat : 2			Peringkat : 2			Peringkat : 1		

Dari data diatas dapat diketahui bahwa skor rata-rata *Good Corporate Governance* dalam 3 tahun adalah **1,83**. Dari tahun 2014-2016 terlihat ada sedikit penurunan dari indeks *Self Assesment Good Corporate Governance* tersebut namun ini membuat peringkat GCG meningkat. Penilaian *Good Corporate Governance* yang mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24 /DPNP Perihal : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 25 Oktober 2011. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum yaitu “*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*)”. Pokok-pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

## 5.9 Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Pembangunan Daerah DIY Dalam Meningkatkan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Peneliti akan menguraikan bagaimana *Good Corporate Governance* di BPD DIY mampu mendorong kinerja BPD secara keseluruhan. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY yang didirikan pada tahun 1961, pemegang sahamnya adalah Pemprop DIY dan Pemda Kabupaten/Kota se-DIY. Tujuan pendirian BPD DIY adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang serta berbagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bank BPD DIY menjadi salah satu BUMD bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas dan kasir daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. *Good corporate governance* pada Bank Pembangunan Daerah DIY telah menghasilkan nilai-nilai positif untuk menjaga konsistensi dan profesionalismenya dalam menuju kearah kinerja yang lebih baik. Maka bank Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY melaksanakan suatu kegiatan usahanya dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. (Penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/4/PBI/2006 yaitu Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum)

Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam GCG pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY ada beberapa prinsip yang telah diimplementasikan antara lain prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran yang jika dilaksanakan dengan baik dan benar oleh Bank Pembangunan Daerah DIY maka akan berdampak Bank Pembangunan Daerah DIY tersebut kearah kemajuan dan jika Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY tidak mau bekerja dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* maka berbagai potensi negatif akan berkembang dan akhirnya dapat mempengaruhi etika kerja dari sumber daya Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY.

**Tabel 5.13**  
**Ikhtisar Keuangan**

No	Uraian	2014	2015	2016
	ASET			
1	Kas	296.58	338.93	317.08
2	Giro Pada Bank Indonesia	542.79	652.05	494.51
3	Giro pada bank lain	7.61	5.01	2.88
4	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	1,301.06	1,480.93	2,304.92
5	Kredit yang diberikan	4,896.34	5,256.42	5,616.58

6	Pembiayaan Syariah	291.24	336.60	373.86
7	Efek-efek untuk Tujuan Investasi	350.98	426.48	439.79
8	Aset Tetap	102.64	157.68	156.84
9	Aset Tak berwujud	1.19	0.91	0.85
10	Aset Pajak Tangguhan	15.82	18.95	21.13
11	Aset Lain-lain	60.83	66.61	77.34
12	Total Aset	7,821.59	8,689.89	9,739.53
	<b>LIABILITAS</b>			
13	Liabilitas Segera	84.37	88.59	36.30
14	Simpanan dari bank lain	6,368.03	6,841.38	7,380.20
15	Simpanan dari bank lain	241.36	329.76	568.09
16	Utang Pajak	19.54	26.58	24.67
17	Pinjaman yang diterima	52.12	81.38	50.97
18	Liabilitas lain-lain	85.96	97.15	110.43
19	Total Liabilitas	6,851.38	7,464.85	8,170.66
	<b>EKUITAS</b>			
20	Modal ditempatkan dan disetor penuh	559.49	559.49	735.63

21	Dana Setoran Modal	0.00	176.15	264.37
	Keuntungan (Kerugian) Pengukuran Kembali Program			0.07
22	Imbalan Pasti	-0.22	0.98	
23	Saldo Laba			
	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	255.94	301.87	357.02
	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	155.01	186.55	211.78
24	Total Ekuitas	970.22	1,225.04	1,568.87
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPRASIONAL			
25	Pendapatan bunga bersih	531.19	584.40	659.92
26	Laba Operasional	225.11	256.99	290.12
	Laba Sebelum Pajak			
27	Penghasilan	221.02	251.69	286.27
28	Laba Bersih	163.63	186.15	211.78
	Laba Komprehensif Tahun			
29	Berjalan	162.76	187.35	210.86
	RASIO KEUANGAN			

30	ROA (%)	2.88	2.94	3.05
31	ROE (%)	22.59	21.99	17.7
32	NIM (%)	7.83	7.50	17.7
33	BOPO (%)	72.64	71.98	70.15
34	LDR (%)	80.34	80.99	80.84
35	CAR (%)	16.61	20.22	21.61
36	NPL (GROSS) (%)	0.90	1.05	3.40
37	NPL (Netto) (%)	0.37	0.51	2.47

Dari ikhtisar keuangan diatas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh indikator keuangan menunjukkan trend meningkat. Aset Bank mencapai Rp 9,739.53 miliar, dengan laba mencapai Rp 210.86 miliar. Pencapaian rasio keuangan Bank BPD DIY posisi Desember 2015, CAR sebesar 20,22%, *Return on Equity* (ROE) sebesar 21,99%, *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 7,50 %, *Return on Asset* (ROA) sebesar 2,94%, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 71,89% serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) 80,99%, dan tingkat NPL gross sebesar 1,05% dan NPL Netto sebesar 0,65%. Pada tahun 2016 pencapaian rasio keuangan Bank BPD DIY posisi Desember 2016, CAR sebesar 21,61%, *Return on Equity* (ROE) sebesar 17.7%, *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 17.7%, *Return on Asset* (ROA) sebesar 3.05%, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 70.15 % serta *Loan to Deposit Ratio* (LDR) 80.84%, tingkat NPL gross sebesar 3.40% dan NPL Netto sebesar 2.47%.

**Tabel 5.14**  
**Penyaluran Kredit**

Uraian	2015	Pertumbuhan		2016	Pertumbuhan	
		(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
<b>Kredit Produktif</b>						
Kredit Modal						
Kerja	1,626,590	15,506	-0.94	954.93	20.94	2.24
Kredit Investasi	933,992	71,730	8.32	1,422.58	204.01	12.54
Sindikasi	271,291	14,220	-4.98	575.97	304.68	112.31
<b>Kredit Non-Produktif</b>						
Kredit Konsumtif	2,761,150	356,260	14.81	3,036.15	275.00	9.96
<b>Jumlah Kredit</b>	<b>5,593,023</b>	<b>398.26</b>	<b>7.67</b>	<b>5,989.63</b>	<b>396.61</b>	<b>7.09</b>
Penyisihan						
Kerugian						
Penurunan Nilai	50,696	1,982		65.62	14.93	29.44
<b>Kredit bersih</b>	<b>5,542,328</b>	<b>400,246</b>	<b>7.78</b>	<b>5,924.01</b>	<b>381.68</b>	<b>6.89</b>

Kredit yang disalurkan sampai Tahun 2016 mencapai lebih dari Rp

5,593,023 miliar termasuk untuk UMKM , kredit Mikro, Kecil, Menengah, dan Non UMKM.



**Tabel 5.15**  
**Perkembangan Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha**

	<b>Uraian</b>	<b>2015</b> <b>(Rp Miliar)</b>	<b>2016</b> <b>(Rp Miliar)</b>	<b>Pertumbuhan</b> <b>%</b>
1	Kredit UMKM	1,967.12	1,799.30	6.07
	Kredit Mikro	342.90	272.67	-5.23
	Kredit Kecil	609.92	559.91	0.99
	Kredit menengah	1,014.30	966.73	14.14
2	Kredit Non UMKM	3,625.90	4,190.33	8.55
3	Total Kredit yang diberikan	5,593.02	5.989.63	7.67

Penyaluran kredit ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pertanian Propinsi DIY, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi DIY, Bapertarum-PNS, Kementerian Koperasi dan usaha Kecil/Mikro, Yayasan Damandiri, dan Yayasan Dakab. Terkait dengan kinerja Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 43.220.540.695,24 dapat direalisasikan sebesar Rp. 43.220.540.695,00 atau 100,00% dan meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 36.153.255.604,00. Hasil pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah tersebut merupakan bagian laba yang diperoleh pada tahun buku 2013, dimana total aset sebesar Rp. 6.523.242.994.870,00 dan pihak ketiga sebesar Rp. 5.774.926.991.657,00 modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp.

262.477.000.000,00 dan laba bersih sebesar Rp. 128.196.964.587,00. Modal disetor Pemda DIY sebesar Rp. 183.500.000.000,00 sehingga rasio bagian laba terhadap penyertaan modal sebesar 23,55%, lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 28,36%. Hal ini disebabkan karena adanya tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2013 sebesar Rp. 36.000.000.000,00 yang dicairkan pada akhir tahun. Pada tahun 2014 telah dilakukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,00 sehingga modal disetor dan ditempatkan penuh dari Pemda DIY menjadi sebesar Rp. 233.500.000.000,00 atau 45,78% dari modal dasar yang harus dipenuhi Pemda DIY sebesar Rp. 510.000.000.000,00. Sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp. 276.500.000.000,00 yang ditargetkan untuk dipenuhi paling lambat tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, dimana Bank dengan modal inti di bawah Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dibatasi kegiatannya, maka pemenuhan modal dasar oleh masing-masing pemegang saham menjadi perhatian serius. Saat ini modal inti PT. Bank Pembangunan Daerah DIY masih berada pada BUKU 1, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Kegiatan usaha yang diperkenankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana, trade finance, kegiatan keagenan dan kerjasama, sistem pembayaran dan e-banking dengan cakupan terbatas, penyertaan modal sementara dalam penyelamatan kredit, serta jasa lainnya dalam rupiah (*Basic Bank Service*).

Dari Pendapatan Asli Daerah DIY, Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan yang

Dipisahkan mengalami kenaikan pertumbuhan rata-rata sebesar 16,04 persen. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berasal dari dividen laba BUMD yakni PD. Tarumartani, Bank BPD, PT. Anindya Mitra Internasional, PT. Yogya Indah Sejahtera, PT. Asuransi Bangun Askrida serta Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP).

Total realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini cenderung sesuai dengan yang dianggarkan. Selisih realisasi hanya berkisar lebih atau kurang 1 persen dari anggaran. Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan ini menunjukkan bahwa BUMD Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bisa menyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Meski begitu, dengan proporsi hanya berkisar 3 - 3,5 persen dari total Pendapatan Daerah, proporsi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan masih perlu ditingkatkan.

Selama lima tahun, Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dengan tingkat rata-rata 9,72 persen per tahun. Sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

- a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai dan/atau angsuran/cicilan;
- b) Pendapatan dari jasa giro;
- c) Pendapatan bunga deposito;
- d) Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;

- e) Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f) Pendapatan dari penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh skpd;
- h) Pendapatan denda pajak;
- i) Pendapatan denda retribusi;
- j) Pendapatan dari pengembalian;
- k) Pendapatan dari eksekusi atas jaminan
- l) Pendapatan dari penyelenggaraan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n) Pendapatan dari jasa layanan BLUD;
- o) Pendapatan dari pengelolaan dana bergulir;
- p) Pendapatan dari dana pembinaan dan jasa produksi pengelolaan BUKP;
- q) Pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- r) Pendapatan dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan dan jaminan pemeliharaan pada proses pengadaan barang dan jasa;

- s) Pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
- t) Pendapatan dari denda lain-lain. Realisasi Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selalu melebihi dari yang dianggarkan dengan kisaran di atas 25 persen.

Dalam analisis kinerja keuangan terutama posisi keuangan dalam hal aset total aset Bank BPD DIY menunjukkan peningkatan dari Rp8.689,89 miliar pada Tahun 2015 menjadi Rp. 9.739,53 miliar pada Tahun 2016 atau meningkat sebesar 12,08%. Peningkatan aset ini dipicu oleh meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, aset pajak tangguhan, dan aset lain-lain.

Hubungan antara GCG dan aset tahun 2014-2016 terlihat dalam tabel berikut:

**Inter-Item Correlation Matrix**

	GCG1	GCG2	GCG3	ASSET1	ASSET2	ASSET3
GCG1	1.000	.967	.950	-.251	-.247	-.282
GCG2	.967	1.000	.917	-.227	-.222	-.255
GCG3	.950	.917	1.000	-.221	-.215	-.252
ASSET1	-.251	-.227	-.221	1.000	1.000	.989
ASSET2	-.247	-.222	-.215	1.000	1.000	.991
ASSET3	-.282	-.255	-.252	.989	.991	1.000

Korelasi antara GCG tahun 2014 dengan aset pada tahun 2014 menunjukkan angka -0,251. Kemudian GCG 2015 dengan aset tahun 2015 menunjukkan nilai -0,222 lalu pada tahun 2016 menunjukkan -0,252. Terlihat dalam tabel tersebut menunjukkan korelasi antar tahun yang negatif, ini bermakna GCG belum mampu meningkatkan aset secara signifikan, namun apabila dilihat dari nilai hubungan GCG tahun 2014 dengan GCG tahun 2015 menunjukkan korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,967, kemudian pada GCG tahun 2015 dengan GCG tahun 2016 sebesar 0,917 memang ada penurunan namun hubungannya masih positif dan signifikan. Kemudian hubungan antara aset tahun 2014 dengan aset tahun 2015 sebesar 1,00 diikuti aset tahun 2016 sebesar 0,991 ini menunjukkan bahwa masing-masing aset pada setiap tahunnya menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan.

Hubungan antara GCG dengan Aset menjadi hal yang penting mengingat GCG diharapkan mampu meningkatkan Aset. Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan dan merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan (Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu).

Dari data dibawah ini dapat diketahui bahwa hubungan antara aset dengan GCG pada tahun 2014 dengan nilai aset 7821,59 terhubung dengan nilai GCG pada peringkat 2, kemudian nilai aset pada tahun 2015 sebesar 8689,89 terhubung

dengan nilai GCG pada peringkat 2, selanjutnya pada tahun 2016 dengan nilai aset yang semakin meningkat yaitu sebesar 9739,53 maka nilai aset ini mendukung untuk pencapaian GCG pada peringkat 1, kesimpulannya nilai aset yang semakin tinggi ini akan memperbaiki nilai Good Corporate Governance pada peringkat 1. Pada olah data GCG dirujukkan dengan aset terlihat bahwa pada saat GCG mampu mencapai peringkat 1 maka aset bertambah, ini terjadi pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 nilai asetnya berada dibawah nilai aset tahun 2016 sehingga hanya mampu mencapai GCG pada peringkat 2.

### GCG \* ASET Crosstabulation

Count

		ASET			Total
		7821.59	8689.89	9739.53	
GCG	1.00	0	0	1	1
	2.00	1	1	0	2
Total		1	1	1	3

Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, peyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Penyelesaian kewajiban masa kini, selain pembebasan dari kreditur, biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan untuk memenuhi

tuntutan pihak lain (Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu).

Dari tabel dibawah ini dapat dilihat saat GCG berada pada peringkat 2, nilai liabilitas juga menunjukkan angka yang lebih rendah.

### GCG \* LIABILITAS Crosstabulation

Count

	LIABILITAS			Total
	6851.38	7464.85	8170.66	
1.00	0	0	1	1
GCG 2.00	1	1	0	2
Total	1	1	1	3

Ekuitas (*Equity*) adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan tergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Biasanya hanya karena faktor kebetulan jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham perusahaan (Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS+*. Yogyakarta: Graha Ilmu). Dari analisis hubungan antara GCG dengan ekuitas dapat diperhatikan polanya disaat GCG



berada pada peringkat 1 , nilai ekuitas menjadi lebih tinggi. Ini berarti GCG yang baik mampu mendorong peningkatan ekuitas.

### GCG \* EKUITAS Crosstabulation

Count

		EKUITAS			Total
		970.22	1225.04	1568.87	
GCG	1.00	0	0	1	1
	2.00	1	1	0	2
Total		1	1	1	3

Demikian juga pada analisis Pendapatan dan beban operasional. Dari analisis tabel dibawah ini diketahui bahwa pada saat GCG memiliki nilai 1 maka Pendapatan dan beban Operasional pun meningkat.

#### 5.10 Kontribusi Bank Pembangunan Daerah DIY Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Analisis pada sub bab ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang Berapa besar kontribusi Bank Pembangunan Daerah DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Kulon progo tahun 2014-2016. Peneliti memberikan sejumlah pertanyaan kepada Divisi Humas dan sekretariat Direksi terkait dengan berapa besar Kontribusi Bank BPD DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo, Narasumber mengatakan bahwa:

“Yang jelas kalau untuk BUMD kita masih selalu tertinggi mas untuk nyumbang ke PAD nya, bukan hanya di Kulon Progo tapi juga hampir di semua kabupaten kota di DIY malah. Mas nya coba hitung sendiri saja kan saya lihat ini di proposalnya sudah ada rumusnya mau menghitung berapa besar kontribusinya”

Untuk itu Peneliti menggunakan Formula dalam melakukan perhitungan jumlah kontribusi Bank BPD DIY terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana yang telah peneliti cantumkan dalam teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan formula sebagai Berikut:

$$\% \text{Kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan hasil laba Bank Pembangunan Daerah Provinsi  
DIY

Y = Realisasi Penerimaan PAD

5.5.1 PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

**Tabel 5.16**

<b>JENIS PENERIMAAN</b>	<b>TAHUN</b>		
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
a. Pajak Daerah	21.171.477.417,00	25.528.089.698,50	31.393.835.053,70
b. Retribusi Daerah	6.777.314.436,00	6.965.714.003,25	9.857.662.642,63
c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.176.928.233,90	10.534.500.875,11	14.317.819.815,93
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	120.221.986.306,27	127.794.021.981,48	124.704.046.082,43
<b>JUMLAH</b>	<b>158.800.563.703,19</b>	<b>170.822.326.558,34</b>	<b>180.273.363.594,69</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kulon Progo

5.5.2 Realisasi Kontribusi BPD DIY terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo  
Tahun 2014-2016

**Tabel 5.17**

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
<b>BPD DIY</b>	5.713.983.775,68	7.130.490.884,32	8.803.939.516,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo

Maka didapat hasil besaran kontribusi Bank BPD DIY terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016 dalam Persen yaitu:

1. 2014

$$\begin{aligned} \% \text{ Kontribusi} &= 5.713.983.775,68 / 158.800.563.703,19 \times 100\% \\ &= 4\% \end{aligned}$$

2. 2015

$$\begin{aligned} \% \text{ Kontribusi} &= 7.130.490.884,32 / 170.822.326.558,34 \times 100\% \\ &= 4\% \end{aligned}$$

3. 2016

$$\begin{aligned} \% \text{ Kontribusi} &= 8.803.939.516,00 / 180.273.363.594,69 \times 100\% \\ &= 5\% \end{aligned}$$

Peranan penerapan GCG pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY sangat penting untuk dapat meningkatkan daya saing pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY dalam bersaing pada pasar global yang semakin kuat dampaknya. Dengan adanya penerapan GCG pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY akan menghasilkan kemampuan dalam menciptakan pertumbuhan bisnis sesuai tujuan yang telah direncanakan. Peranan GCG selain dapat membuat Bank Pembangunan Daerah Propinsi DIY menjadi kuat juga dapat melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang saham maupun *stake*

*holders* seperti gaji karyawan, biaya-biaya operasional rutin, biaya bunga pinjaman, baik biaya-biaya tetap maupun biaya-biaya tidak tetap lainnya.